

**AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN TERPADU
KESEHATAN EKONOMI PENDIDIKAN INFRASTRUKTUR DAN
LINGKUNGAN (GERDU KEMPLING) TAHUN 2011-2014 DI KECAMATAN
SEMARANG BARAT**

Oleh:

Anggie Desta Ervita, Titik Djumiarti S.Sos, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research was to identify and describe the factors to increase the accountability of program implementation Gerdu Kempling on 2011-2014 in the Districts of West Semarang and analyzes the accountability of implementation program Gerdu Kempling on 2011-2014 in the Districts of West Semarang. This research is a qualitative descriptive study by collecting data through interview and document study. Informants were collected from District of West Semarang, Village Gisikdrono and Village Kalibanteng Kulon. In this study, researcher used the factors for successful accountability and dimensions of accountability. The results obtained is still not optimal. It is known through research that show the factors to increase the accountability that is an exemplary leader, openness and clarity of information, legitimacy and recognition and feedback has been good, but to increase coordination in the delivery of mail is still not good enough and the communication process is too simple. In addition to the dimensions of accountability shows that the policy of accountability and program accountability is still not optimal. The advices given by the researcher is about to improve exemplary leader to participate in the promotion phase and training, coordination by integrating Programme activities Gerdu Kempling, provision of information services on the website, Development with marketing, improvement of human resources with the ESQ training, Gathering and Outbound, Preparation action program through Participatory Learning and Action (PLA), improved performance division of labor based on the ability of the executive team programs Gerdu Kempling, preparation of the integrity zone with the team programs Gerdu Kempling, preparation of technical monitoring periodically in accordance with technical guidelines that have been set.

Keywords: accountability, Gerdu Kempling program, reduce poverty

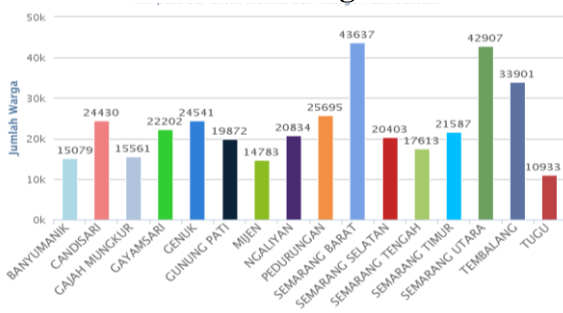
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia termasuk salah satu negara berkembang seperti yang kita ketahui negara berkembang lainnya, Indonesia selalu menghadapi masalah ekonomi yang sama dan tak kunjung usai. Dampak dari masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 adalah 30.8826 jiwa dan mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Kemiskinan di Indonesia terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah Kota Semarang.

Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan dan program berbasis pemberdayaan masyarakat Kota Semarang yaitu Program Gerdu Kempling, yang dituangkan dalam Instruksi Walikota Semarang Nomor 054/2 Tahun 2010. Berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Program Gerdu Kempling ditujukan untuk 16 Kecamatan di Kota Semarang. Program Gerdu Kempling merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dengan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan yang mencakup segala aspek dan terangkum dalam 5 (lima) bidang yaitu Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan.

Gambar 1.1
Grafik Statistik Warga Miskin Kota Semarang

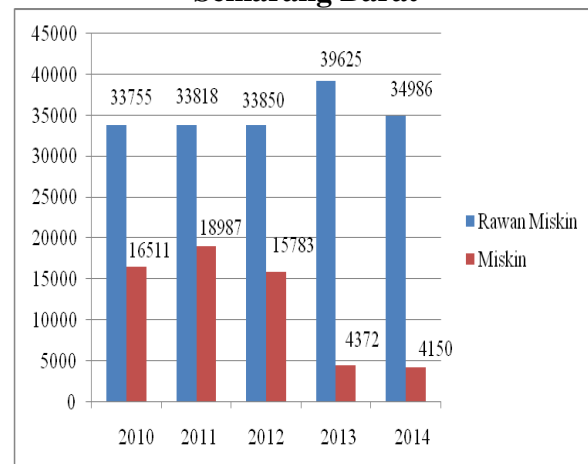


Sumber : simgakin.semarangkota.go.id

Pada Gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik jumlah angka kemiskinan selama pelaksanaan Program Gerdu Kempling tahun 2011- 2014, dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang memiliki angka kemiskinan yang masih tinggi yaitu Kecamatan Semarang Barat, Semarang Utara dan Tembalang.

Akan tetapi, dari ketiga Kecamatan tersebut, kecamatan yang paling tinggi adalah Kecamatan Semarang Barat, padahal jika dilihat dari segi perekonomian kawasan Semarang Barat adalah kawasan industri. Kemiskinan di Kecamatan Semarang Barat dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Grafik Jumlah Warga Miskin Kecamatan Semarang Barat



Sumber : Data Angka Kemiskinan Kecamatan Semarang Barat Tahun 2010-2014

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di Kecamatan Semarang Barat tetap tinggi meskipun sudah dilaksanaka Program Gerdu Kempling, seperti anggaran pelaksanaan yang sedikit, koordinasi yang kurang, hingga partisipasi masyarakatnya yang rendah. Melihat kondisi permasalahan tersebut maka diperlukan akuntabilitas yang jelas dari pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat dari Tahun 2011-2014. Selain itu bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, seperti yang dicantumkan pada Permenpan No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh *American University, Washington, DC, USA mengenai Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?* juga menjelaskan bahwa akuntabilitas pada pemangku kepentingan atau stakeholder sangat diperlukan karena yang dibutuhkan masyarakat adalah sebuah bentuk tanggungjawab atas apa yang telah dilaksanakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh *International Conference on Accounting Studies di Kuala Lumpur, Malaysia tentang Broadening corporate accountability: An 'idealised' downward accountability model* yang menjelaskan bahwa saat ini dibutuhkan akuntabilitas dalam organisasi yang lebih besar karena masyarakat membutuhkan sebuah akuntabilitas yang jelas, dalam penelitian tersebut terdapat model akuntabilitas yang dapat digunakan untuk memberikan akuntabilitas dalam organisasi dalam menjalankan sebuah program. Untuk itu perlu dilihat akuntabilitas pelaksanaan Program Gerdu Kempling tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat.

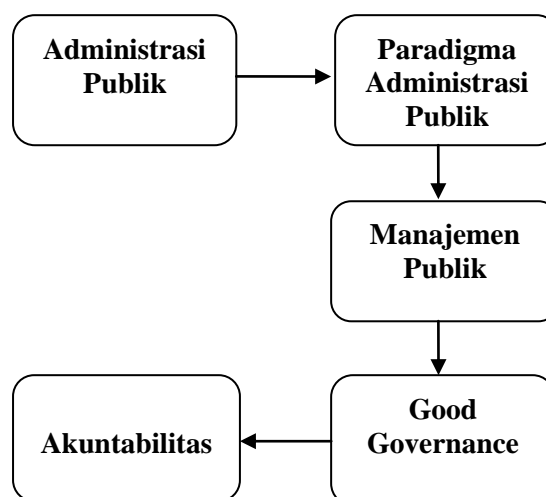
B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai akuntabilitas pelaksanaan program gerakan terpadu kesehatan ekonomi pendidikan infrastruktur dan lingkungan (gerdu kempling) tahun

2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat adalah

1. Mendiskripsikan faktor-faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat.
2. Menganalisis akuntabilitas pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat.

C. TEORI



C.1 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat (Kumorotomo, 2005:3).

Rahardjo (2011: 89) menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban untuk

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Faktor Keberhasilan Akuntabilitas:

- a) Pemimpin teladan
- b) Debat publik (Public debat)
- c) Koordinasi
- d) Otonomi
- e) Keterbukaan dan kejelasan
- f) Legitimasi dan pengakuan
- g) Negoisasi
- h) Pemasyarakatan dan publisitas pendidikan
- i) Umpan balik dan evaluasi
- j) Kemampuan penyesuaian

C.2 DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK

Menurut J.D Stewart (dalam Andrianto 2007: 23) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima dimensi yaitu :

1. *Policy Accountability*, yakni akuntabilitas atas pilihan - pilihan kebijakan yang dibuat.
2. *Program Accountability*, yakni akuntabilitas atas pencapaian tujuan/hasil dan efektivitas yang dicapai.
3. *Performance Accountability*, yakni akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien.
4. *Process Accountability*, yakni akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan – tindakan yang ditetapkan.
5. *Probity and Legality Accountability*, yakni akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai

anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang – undang yang berlaku

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

E. PEMBAHASAN

Akuntabilitas pelaksanaan program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat masih belum optimal. Hal ini diketahui melalui hasil penelitian yang dilihat dari faktor-faktor pendukung peningkatan akuntabilitas dan dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling

1. Keteladanan Pemimpin dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat.

Keteladanan pemimpin yang baik maka akan mempengaruhi akuntabilitas. Keteladanan pemimpin yang dilihat dari respon pemimpin, tindakan pemimpin, kemampuan pemimpin, dimana respon pemimpin dalam pelaksanaan program dilakukan dengan keikutsertaan pemimpin pada pelatihan yang diadakan, dan evaluasi setelah pelaksanaan program sebagai bentuk respon kepedulian. Tindakan pemimpin dilakukan dengan melakukan pendisposisian surat, dan kemampuan pemimpin adalah dengan menuangkan ide-ide kreatif untuk menyukseskan program Gerdu Kempling ini.

2. Koordinasi dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Koordinasi yang baik maka sangat mempengaruhi akuntabilitas. Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan pembentukan tim yang terdiri dari pemimpin kecamatan, sekretaris kecamatan, seksi kesejahteraan sosial kecamatan dan seksi-seksi kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahannya serta tokoh masyarakat. Akan tetapi koordinasi yang dilakukan masih kurang khususnya pada penyampaian informasi melalui surat yang masih terkendala karena surat yang disampaikan selalu mendadak sehingga mempersulit untuk menyampaikan kepada masyarakat.

3. Keterbukaan dan Kejelasan Informasi dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Keterbukaan dan kejelasan mengenai informasi sangat mempengaruhi akuntabilitas. Pada pelaksanaan program Gerdu Kempling keterbukaan yang dilakukan mulai keterbukaan anggaran dimana kecamatan selalu menyampaikan kepada masyarakat maupun pihak kelurahan, yang biasanya disampaikan pada saat rapat atau kegiatan pelatihan sedangkan kejelasan informasi mengenai pelatihan disampaikan secara jelas dan masyarakat pun selalu mendapatkan informasi mengenai pelatihan ataupun bantuan yang diadakan.

4. Legitimasi dan Pengakuan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Legitimasi dan pengakuan program sangat mempengaruhi akuntabilitas. Legitimasi dan pengakuan program yang dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap program sangat beragam hal ini disebabkan karena tidak semua pola pikir masyarakat sama, karena banyak dari mereka yang masih kurang mengetahui manfaat dari Program Gerdu Kempling. Penerimaan masyarakat

terhadap program tersebut yang beragam tentu partisipasi masyarakat pun terhadap program tidak banyak.

5. Umpan Balik dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat

Umpan balik dan Evaluasi sangat mempengaruhi akuntabilitas maka umpan balik masyarakat terhadap program Gerdu Kempling diberikan dengan masyarakat adalah mereka yang mau menerima maka mengikuti program, sosialisasi serta bantuan yang diberikan dari pemerintah yang dibantu oleh SKPD, CSR dan Kecamatan Semarang Barat, dan untuk evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan program.

6. Akuntabilitas Kebijakan Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Akuntabilitas yang baik dipengaruhi pada pelaksanaan akuntabilitas kebijakannya. Untuk itu pada pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Instruksi Walikota Semarang No.054/2/2011 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia, meskipun sumber daya manusianya masih terdapat yang kurang produktif, hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan faktor usia, namun hal tersebut tidak mengganggu pelaksanaan program dan dapat diatasi.

7. Akuntabilitas Program Gerdu Kempling yang dilakukan Kecamatan Semarang Barat

Pelaksanaan akuntabilitas yang baik dipengaruhi pada pelaksanaan akuntabilitas program. Pada akuntabilitas program dilihat dari strategi dalam melaksanakan program yaitu dengan strategi pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung oleh seksi kesejahteraan sosial baik

kecamatan maupun kelurahan. Pelaksanaan program pun dengan menggunakan sumber daya yang bersumber dari CSR dan APBD yang digunakan untuk program pelatihan dan pemberian bantuan modal.

8. Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya. Kinerja yang dilakukan pada pelaksanaan program tersebut dilihat pada pencapaian target yang selalu memenuhi target yang telah ditentukan yaitu penurunan 2% per tahun, dan kecamatan Semarang Barat selalu memenuhi target meskipun angka kemiskinan tetap tinggi. Alur kerja yang dilakukan pun selalu berawal dari pemimpin kecamatan yaitu camat yang kemudian melalui seksi kesejahteraan sosial kecamatan yang kemudian ke kelurahan. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai target adalah pendekatan kepada masyarakat secara langsung yang biasanya dilakukan oleh seksi kesejahteraan sosial.

9. Akuntabilitas Proses dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat

Akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari pelaksanaan akuntabilitas prosesnya. Proses pelaksanaan program gerdu Kempling lebih banyak pada pelaksanaan pelatihan yang biasanya diberikan oleh SKPD yang ada di Kota Semarang. Namun selain pelatihan, pemberian bantuan modal juga diberikan yang berasal dari CSR dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan yaitu pihak CSR yang akan memberikan bantuannya menyampaikan kepada pemerintah kemudian pemerintah karena pemerintah sebagai fasilitator dengan dibantu PTN atau PTS, setelah itu bantuan diberikan kepada masyarakat.

10. Akuntabilitas Legalitas dalam Pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat

Pelaksanaan akuntabilitas yang baik dapat dilihat dari pelaksanaan akuntabilitas legalitas. Pelaksanaan Program Gerdu Kempling selalu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan selalu patuh pada peraturan. Tak hanya itu pelaksanaan program pun selalu menggunakan surat keputusan yaitu surat disposisi.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa akuntabilitas pelaksanaan Program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat masih belum optimal, hal ini dapat dilihat pada faktor-faktor peningkatan akuntabilitas dan dimensi akuntabilitas dibawah ini:

1. Faktor-Faktor Pendukung Peningkatan Akuntabilitas :

a) Keteladanan Pemimpin

Keteladanan pemimpin yang diberikan pada pelaksanaan program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat sudah baik dibuktikan dengan respon yang baik dimana pemimpin ikut serta dalam kegiatan program tersebut dan menunjukkan kepeduliannya, kemudian tindakan pemimpin yang dilakukan dalam menyukkseskan program serta ide-ide dan pengetahuan yang dimiliki pemimpin.

b) Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat dengan pembentukan tim dan proses komunikasi yang dilakukan dengan sederhana, namun koordinasi yang dilaksanakan masih kurang karena masih terdapat kendala pada koordinasi dalam penyampaian surat.

c) Keterbukaan dan Kejelasan Informasi

Kejelasan dan keterbukaan informasi sudah dilakukan dengan baik, keterbukaan mengenai laporan pertanggungjawaban dan anggaran, serta kejelasan informasi mengenai pelatihan sudah disampaikan dengan jelas.

d) Legitimasi dan Pengakuan

Penerimaan masyarakat terhadap program tergantung dari pemikiran masyarakatnya karena tidak semua masyarakat mau menerima, karena itu partisipasi masyarakat pun rendah dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya program tersebut sedangkan wujud pengakuan masyarakat yang menerima program tersebut ialah mengikuti program dan mengembangkan ilmu yang didapatkan dari program tersebut.

e) Umpan balik dan Evaluasi Program

Umpan balik masyarakat terhadap Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat dengan mengikuti program, sosialisasi serta bantuan yang diberikan dari pemerintah yang dibantu oleh SKPD, CSR dan Kecamatan Semarang Barat. Sedangkan untuk evaluasi hasil pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat dilakukan setelah program telah dilaksanakan dan dilakukan pada saat rapat rutin yang diadakan oleh Kecamatan Semarang Barat.

2. Dimensi Akuntabilitas

a) Akuntabilitas Kebijakan

Pelaksanaan program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat selalu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu Instruksi Walikota Semarang No. 054/2/2011 yang merupakan pedoman dari pelaksanaan program Gerdu Kempling dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki, namun

masih terdapat sumber daya manusianya yang kurang yang disebabkan oleh faktor usia dan latar belakang pendidikan.

b) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program dapat dilihat dari strategi yang digunakan yaitu dengan strategi pendekatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang masih belum berpartisipasi, kemudian penggunaan sumberdaya untuk bantuan modal dalam pelaksanaan program bersal dari APBD akan tetapi bukan untuk pemberian bantuan modal melainkan sosialisasi dan pelatihan, sedangkan untuk capaian hasil dari program selalu berdasarkan target yang ditentukan.

c) Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat sudah dilakukan dengan baik dapat dilihat dari target capaian pelaksanaan program, penggunaan anggaran, alur kerja tim, dan tindakan untuk pencapaian.

d) Akuntabilitas Proses

Proses pelaksanaan pelatihan program Gerdu Kempling lebih banyak diberikan dari SKPD yang ada di Kota Semarang yang terkadang juga disertai bantuan untuk masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut. Prosedur dalam pemberian bantuan modal yang dilakukan oleh CSR berdasarkan peraturan Instruksi Walikota yaitu menyampaikan kepada pemerintah dengan dibantu PTN atau PTS setelah itu bantuan diberikan langsung kepada masyarakat. Proses pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan setelah pelaksanaan program, dan laporan pertanggungjawaban tersebut melibatkan peran masyarakat seperti dibutuhkannya laporan perkembangan dari program yang dikembangkan masyarakat.

e) Akuntabilitas Legalitas

Pelaksanaan program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat selalu patuh dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tak hanya itu dalam pelaksanaan program yang dilakukan pun di Kecamatan Semarang Barat sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan selalu menggunakan surat keputusan. Surat keputusan tersebut berupa surat disposisi yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti yang telah diatur pada permendagri No. 55 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan untuk menunjang peningkatan akuntabilitas pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat yang dilihat dari faktor-faktor pencapaian keberhasilan akuntabilitas dan dimensi akuntabilitas, berikut saran yang dilihat dari faktor-faktor pencapaian keberhasilan akuntabilitas :

1. Keteladanan pemimpin dalam pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat perlu ditingkatkan melalui :

a) Keikutsertaan pemimpin pada tahap sosialisasi Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat

b) Keikutsertaan pemimpin pada tahap pelatihan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat

c) Kemampuan untuk memberikan ide kreatif seperti pemberian reward kepada kelurahan sebagai tim pelaksana program Gerdu Kempling yang mampu melaksanakan pelatihan dengan baik.

d) Kemampuan untuk menentukan skala prioritas melalui pelatihan analisis organisasi dan manajemen .

2. Tim koordinasi pelaksana Program Gerdu Kempling yang diketuai oleh Kecamatan Semarang Barat perlu meningkatkan koordinasi dengan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan Program Gerdu Kempling untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui :

a) Mengalokasikan sumber daya manusia yang dimiliki untuk penyampaian informasi kegiatan.

b) Mengalokasikan waktu yang dimiliki untuk penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan.

3. Keterbukaan dan Kejelasan Informasi pada pelaksanaan Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat perlu ditingkatkan melalui:

a) Peningkatan transparansi pada informasi anggaran dengan transparansi dalam proses penyusunan anggaran.

b) Peningkatan transparansi pada informasi laporan pertanggungjawaban dengan penyusunan petunjuk teknis laporan pertanggungjawaban.

c) Penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dengan dilengkapi petunjuk teknis, dokumen penyimpanan, dokumen informasi, dan pengamanan informasi yang dicantumkan pada website Kecamatan Semarang Barat.

4. Legitimasi dan pengakuan program pada pelaksanaan Program Gerdu Kempling perlu ditingkatkan melalui

a) Penyusunan petunjuk teknis mulai dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan.

b) Pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat Program Gerdu Kempling.

c) Peningkatan program partisipasi masyarakat melalui komunikasi pembangunan.

5. Umpan balik dan evaluasi program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat perlu ditingkatkan melalui

a) Pengembangan dengan melakukan pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

b) Perlu melakukan evaluasi program secara rutin setelah pelaksanaan Program Gerdu Kempling.

Sedangkan saran untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program Gerdu Kempling Tahun 2011-2014 di Kecamatan Semarang Barat yang dilihat dari dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

1. Akuntabilitas kebijakan pada pelaksanaan program Gerdu Kempling dapat ditingkatkan melalui peningkatan alokasi sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Semarang Barat dengan pemberian pelatihan *ESQ, Gathering* dan *Outbond*.

2. Akuntabilitas program pada pelaksanaan program Gerdu Kempling dapat ditingkatkan melalui:

a) Penyusunan tindakan program sebelum merealisasikan Program Gerdu Kempling melalui *Participatory Learning And Action (PLA)*.

b) Perlu melakukan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

3. Akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan program Gerdu Kempling dapat ditingkatkan melalui peningkatan kinerja dengan pembagian tugas berdasarkan kemampuan yang dimiliki pada tim pelaksana Program Gerdu Kempling di Kecamatan Semarang Barat.

4. Akuntabilitas proses pada pelaksanaan program Gerdu Kempling perlu ditingkatkan melalui:

a) Penyusunan zona integritas bersama tim pelaksana Program Gerdu Kempling.

b) Penyusunan petunjuk teknis pemantauan secara periodik sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2012). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia
- Arifin, Anwar. (2010). *Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Azwar, Saifuddin. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Denhart, J.V dan Denhart, R.B. (2007). *The New Public Service Serving rather than Steering*. London, England: M.E.Sharpe
- Kumorotomo, Wahyu. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta UGM: Pustaka Belajar.
- Mardikanto. (2012). *Pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. (2013). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Rahardjo, Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santosa, Panji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance* Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"*. Bandung: Mandar Maju.

Wakhyudi, M.Comm. (2011). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah Edisi Keenam*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.

Jonathan A. Fox. (2015). *Social Accountability: What Does the Evidence Really Say? American University, Washington, DC, USA*: 1 – 16

Norfaiezah Sawandia*, Ian Thomsonb. (2014). Broadening corporate accountability: An ‘idealised’ downward accountability model. *International Conference on Accounting Studies Kuala Lumpur Malaysia*. (August): 429–436

SIMGAKIN KOTA SEMARANG. Dalam <http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/web/pages/97>. Diunduh pada 11 Oktober 2015 pukul 11.00 WIB